Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan
JUREKA : Jurnal Ekonomi Pembangunan
Website : https://jureka.fekonubt.net/index.php/jureka

PERTUMBUHAN UMKM BELUM MENJAMIN INKLUSI EKONOMI: BUKTI KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN UTARA

A.siti zelpyana [1], Rusdy Setiawan[2]
[1,2]Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Tarakan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 02 Desember, 2024
Direvisi 15 Desember, 2024
Diterbitkan 30 Desember, 2024

Keyword:

MSMEs
Inclusive development
Unemployment
Poverty
North kalimantan

ABSTRACT

MSME promotion is widely expected to improve employment and reduce poverty, yet administrative expansion may not represent productive transformation. This study examines whether growth in recorded MSME establishments was accompanied by lower unemployment and poverty across the districts and city of North Kalimantan. A balanced regional panel was reconstructed from secondary administrative data and audited for reproducibility. Descriptive trends, locality fixed effects, two-way fixed effects, first-difference models, logarithmic specifications, and sensitivity checks were applied. The findings show a pronounced divergence between the expansion of registered enterprises and changes in welfare outcomes. The association with unemployment is small and unstable, while the poverty relationship does not provide robust evidence of improvement. The results indicate that establishment counts are insufficient as a stand-alone measure of inclusive development. The novelty of the study lies in distinguishing entrepreneurial participation from entrepreneurial transformation through a conversion-chain perspective linking registration, active operation, productivity, paid employment, and household income. Policy evaluation should therefore prioritize active status, survival, job quality, earnings, productivity, and local value-chain participation.

Corresponding Author:

A.siti zelpyana,
Universitas Borneo Tarakan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Kota Tarakan, Indonesia

Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menempati posisi penting dalam kebijakan pembangunan karena mampu beroperasi ketika kesempatan kerja formal, investasi berskala besar, dan penciptaan lapangan kerja pemerintah masih terbatas. Hambatan masuk yang relatif rendah memungkinkan rumah tangga mengubah keterampilan, pengetahuan lokal, tenaga kerja keluarga, dan modal terbatas menjadi kegiatan pasar. Secara teoritis, proses tersebut dapat memperluas produksi lokal, menciptakan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan pemilik dan pekerja. Karena itu, pertumbuhan UMKM sering digunakan sebagai tanda berkembangnya basis kewirausahaan dan meningkatnya inklusi ekonomi.

Di Indonesia, UMKM mencakup sebagian besar unit usaha dan menjadi penopang penting penyerapan tenaga kerja. Namun, kontribusinya tidak hanya ditentukan oleh jumlah unit. Skala usaha, teknologi, kemampuan manajerial, akses pembiayaan, produktivitas, serta keterhubungan dengan pasar menentukan apakah usaha mampu bertahan dan menciptakan pendapatan yang layak (Musa & Chinniah, 2016; Tambunan, 2012; Wahyuningsih, 2009). Dengan demikian, kenaikan jumlah usaha terdaftar belum tentu identik dengan pertumbuhan usaha aktif dan produktif.

Kalimantan Utara memberikan konteks yang relevan untuk menguji hubungan tersebut. Provinsi ini terdiri atas Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Tarakan, dengan karakter wilayah yang sangat

Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan
JUREKA : Jurnal Ekonomi Pembangunan
Website : https://jureka.fekonubt.net/index.php/jureka

beragam. Tarakan berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, sedangkan sejumlah wilayah pedalaman dan perbatasan menghadapi biaya logistik tinggi, pasar yang lebih kecil, keterbatasan infrastruktur, serta akses pembiayaan yang tidak merata. Perbedaan tersebut membuat tambahan jumlah UMKM dapat menghasilkan dampak yang berbeda antardaerah.

Data administratif periode 2017-2022 memperlihatkan peningkatan jumlah UMKM terdaftar yang sangat cepat. Akan tetapi, penurunan pengangguran relatif terbatas dan jumlah penduduk miskin secara agregat hampir tidak berubah. Perbedaan arah tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pertumbuhan jumlah UMKM benar-benar menunjukkan perluasan aktivitas produktif yang meningkatkan kesejahteraan, atau sebagian mencerminkan registrasi, reklasifikasi, usaha berproduktivitas rendah, dan usaha yang hanya menyerap tenaga kerja pemilik atau keluarga.

Permasalahan ini penting karena evaluasi kebijakan sering menjadikan jumlah unit usaha sebagai keluaran sekaligus hasil pembangunan. Padahal, usaha dapat terdaftar tetapi tidak aktif, aktif namun berumur pendek, hanya menghasilkan pendapatan bagi pemilik, atau belum mampu membayar pekerja secara memadai. Sebaliknya, jumlah usaha yang lebih sedikit tetapi produktif dan tumbuh dapat menciptakan pekerjaan yang lebih stabil. Penelitian ini karena itu menguji hubungan antara perubahan jumlah UMKM terdaftar dengan pengangguran dan kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota, sekaligus menilai kelayakan jumlah unit sebagai indikator pembangunan inklusif.

Kontribusi penelitian terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian menggunakan variasi antardaerah dan antarwaktu dalam seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Kedua, pengangguran dan kemiskinan dianalisis sebagai dua hasil yang berbeda. Ketiga, penelitian memperkenalkan perspektif rantai konversi: usaha terdaftar harus berubah menjadi usaha aktif, kapasitas produktif, pekerjaan berbayar, dan pendapatan rumah tangga sebelum menghasilkan inklusi ekonomi. Perspektif ini membedakan partisipasi kewirausahaan dari transformasi kewirausahaan.

Tinjauan Pustaka

UMKM, Pekerjaan, dan Kemiskinan

Argumen utama pembangunan UMKM berangkat dari kemampuan usaha kecil menggunakan sumber daya lokal dan membentuk keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Dalam kerangka Hirschman (1958), nilai pembangunan suatu usaha tidak hanya berasal dari keberadaannya, tetapi dari kegiatan tambahan yang dipicu melalui permintaan input, pengolahan, distribusi, dan konsumsi. Oleh sebab itu, sektor dengan intensitas tenaga kerja dan keterkaitan lokal yang kuat cenderung menghasilkan efek kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan usaha yang hanya membagi pasar lokal yang tetap.

Bukti empiris menunjukkan bahwa hubungan UMKM dengan kesejahteraan bersifat bersyarat. Penguatan kualitas UMKM tidak otomatis menurunkan kemiskinan apabila kemampuan usaha tidak terhubung dengan pasar dan perdagangan digital (Anggraeni et al., 2026). Banyak usaha mikro juga tidak mempekerjakan orang di luar pemilik dan menghasilkan laba per pekerja yang rendah, sehingga kapasitas penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan menjadi terbatas (Mekonnen & de Brauw, 2026). Sebaliknya, manfaat terhadap pekerjaan dapat muncul ketika dukungan pembiayaan, literasi keuangan, infrastruktur, dan pemilihan lokasi saling mendukung (Akmatov et al., 2026; Pramanik et al., 2026).

Jumlah unit usaha juga dapat menyembunyikan mutu pekerjaan yang beragam. Pekerja mandiri informal cenderung menghadapi pendapatan dan keterikatan pasar kerja yang lebih rapuh dibandingkan pemilik usaha formal (Abramowitz & Joung, 2026). Aktivitas informal dapat berjalan bersama pengangguran tersembunyi dan ketimpangan pendapatan (Mergenbayeva et al., 2026). Artinya, seseorang dapat keluar dari pengangguran terbuka melalui usaha berpendapatan rendah tanpa keluar dari kemiskinan.

Daya tahan dan produktivitas usaha menjadi mekanisme berikutnya. Data jumlah usaha tidak menunjukkan masuk-keluar usaha, lama bertahan, penjualan, atau jumlah pekerja. Kajian kelangsungan usaha menunjukkan bahwa hambatan sistemik dapat membatasi ketahanan UMKM pada berbagai wilayah dan rantai nilai (Eronmwon et al., 2026). Pembiayaan juga tidak selalu meningkatkan kinerja apabila tidak disertai praktik usaha dan permintaan pasar yang memadai (Ashraf & Lyons, 2026; Gupta & Singh, 2026).

Rantai Konversi dan Hipotesis

Penelitian ini memandang pertumbuhan UMKM sebagai rangkaian konversi: registrasi usaha menjadi aktivitas usaha yang nyata; aktivitas menjadi kapasitas produksi dan permintaan pasar; kapasitas menjadi pekerjaan berbayar; dan pekerjaan menjadi pendapatan rumah tangga yang berkelanjutan. Digitalisasi, kemampuan manajerial, kepercayaan, infrastruktur, dan integrasi rantai nilai memengaruhi setiap tahap

Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan
JUREKA : Jurnal Ekonomi Pembangunan
Website : https://jureka.fekonubt.net/index.php/jureka

(Afrianty et al., 2026; Karanasios et al., 2026; Safitri et al., 2026). Kondisi geografis juga penting karena ketahanan keuangan dan akses pasar usaha perkotaan serta perdesaan berbeda (Leckė & Legenzova, 2026). Berdasarkan mekanisme tersebut, dua hipotesis empiris diajukan. Hipotesis pertama menyatakan bahwa peningkatan jumlah UMKM terdaftar dalam suatu daerah berkaitan dengan penurunan jumlah penganggur. Hipotesis kedua menyatakan bahwa peningkatan jumlah UMKM terdaftar berkaitan dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Kedua hipotesis diperlakukan sebagai hubungan empiris, bukan efek kausal, karena data agregat tidak mengidentifikasi usaha, pekerja, atau rumah tangga tertentu.

Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan desain kuantitatif observasional dengan data panel tahunan. Unit analisis adalah lima kabupaten/kota di Kalimantan Utara, yaitu Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Tarakan. Periode pengamatan mencakup tahun 2017-2022 sehingga membentuk panel seimbang sebanyak 30 observasi daerah-tahun.

Data sekunder diambil dari lampiran data penelitian sumber yang merujuk pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara (2022). Variabel penjelas adalah jumlah unit UMKM terdaftar. Variabel hasil terdiri atas jumlah penganggur dan jumlah penduduk miskin. Seluruh nilai dinyatakan dalam ribuan agar koefisien mudah dibaca. Penggunaan jumlah, bukan tingkat, dipilih karena denominator penduduk dan angkatan kerja tahunan yang konsisten tidak tersedia dalam lampiran sumber.

Sebelum estimasi dilakukan audit reproduksibilitas. Pemeriksaan mencakup kelengkapan panel, observasi ganda, nilai hilang, konsistensi aritmetika, dan kesesuaian antara lampiran, grafik, serta keluaran perangkat lunak pada naskah sumber. Beberapa perbedaan ditemukan, termasuk nilai pada grafik yang tidak sama dengan lampiran dan koefisien lama yang tidak dapat direplikasi. Penelitian ini menetapkan tabel lampiran sebagai sumber data utama karena menyajikan observasi daerah-tahun yang lengkap. Kesimpulan diuji kembali menggunakan nilai alternatif yang tersedia pada grafik.

Analisis deskriptif menyajikan statistik panel, total provinsi, perubahan periode awal-akhir, dan indeks dengan tahun 2017 sebagai dasar. Model utama menggunakan regresi efek tetap wilayah dan tahun: $Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta UMKM_{it} + \varepsilon_{it}$. Efek tetap wilayah mengendalikan karakteristik daerah yang relatif tetap, sedangkan efek tahun mengendalikan guncangan bersama seperti kondisi makroekonomi dan periode pandemi.

Standar error heteroskedastisitas-konsisten HC3 digunakan karena jumlah observasi kecil. Empat spesifikasi diestimasi untuk setiap hasil: efek tetap wilayah, efek tetap dua arah, beda pertama dengan indikator tahun, serta model logaritmik efek tetap dua arah. Uji sensitivitas meliputi tren waktu, indikator setelah 2021, penggantian nilai yang berbeda pada sumber, dan estimasi dengan mengeluarkan satu daerah secara bergantian. Koefisien tidak ditafsirkan sebagai dampak kausal penciptaan usaha. Pertumbuhan UMKM dapat merupakan respons terhadap pengangguran atau kemiskinan, dan faktor berubah-waktu seperti migrasi, investasi publik, bantuan sosial, inflasi, kredit, serta struktur sektor dapat memengaruhi seluruh variabel. Karena hanya terdapat lima daerah dan enam tahun, penelitian menekankan arah hubungan, besaran, ketidakpastian, dan ketahanan hasil.

Hasil Dan Pembahasan

Perkembangan Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan perbedaan skala yang besar antardaerah. Rata-rata jumlah UMKM adalah 5,460 ribu unit, tetapi rentangnya bergerak dari 0,652 ribu sampai 22,924 ribu unit. Rata-rata pengangguran mencapai 3,404 ribu orang dan rata-rata penduduk miskin 10,091 ribu orang. Perbedaan tersebut menguatkan kebutuhan penggunaan efek tetap wilayah agar perbandingan tidak didominasi oleh ukuran daerah.

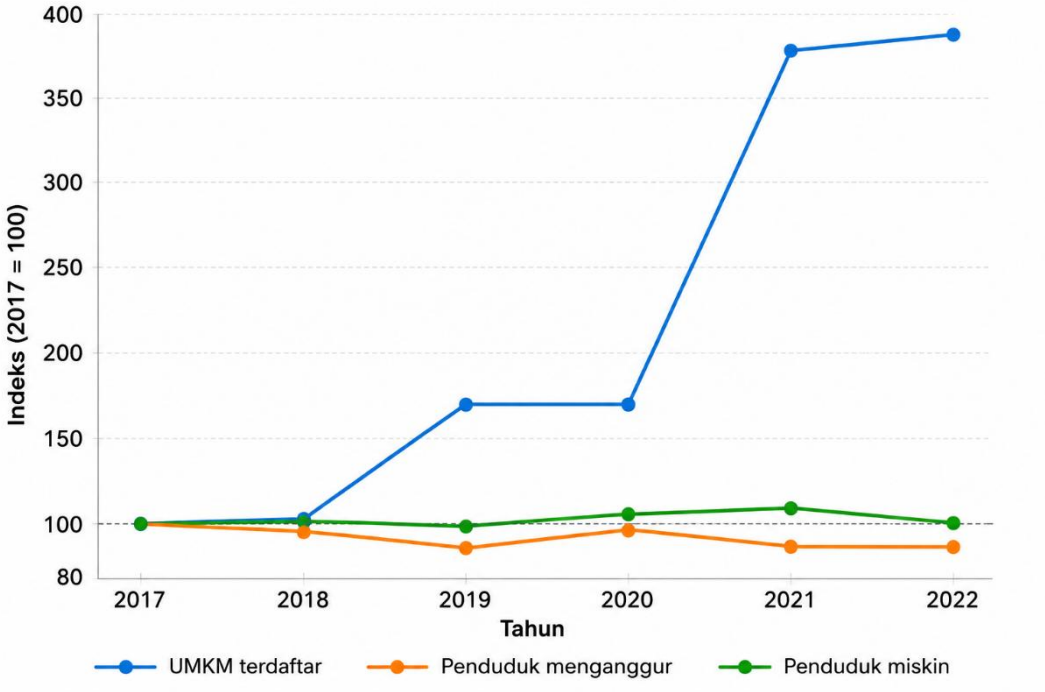
Secara agregat, UMKM terdaftar meningkat dari 12,506 ribu unit pada 2017 menjadi 48,692 ribu unit pada 2022. Dalam periode yang sama, pengangguran menurun dari 18,315 ribu menjadi 16,195 ribu orang, sedangkan penduduk miskin bergerak dari 49,480 ribu menjadi 49,470 ribu orang. Dengan demikian, peningkatan jumlah usaha jauh lebih cepat daripada perbaikan dua indikator kesejahteraan. Lonjakan terbesar terjadi pada 2021, ketika jumlah UMKM lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan mendadak ini dapat menunjukkan pembentukan usaha, perluasan registrasi, perubahan klasifikasi, atau kombinasi ketiganya.

Tabel 1. Statistik deskriptif dan total Provinsi Kalimantan Utara, 2017-2022

Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan
JUREKA : Jurnal Ekonomi Pembangunan
Website : https://jureka.fekonubt.net/index.php/jureka

Variabel	N	Rata-rata	SD	Minimum	Maksimum
UMKM terdaftar	30	5,460	6,202	0,652	22,924
Penduduk menganggur	30	3,404	2,283	0,576	7,669
Penduduk miskin	30	10,091	5,569	1,340	17,570

Catatan: seluruh nilai selain N dinyatakan dalam ribuan.



Gambar 1. Perkembangan indeks UMKM terdaftar, pengangguran, dan kemiskinan; 2017 = 100.

Hubungan UMKM dengan Pengangguran

Dalam model efek tetap wilayah, tambahan seribu UMKM berkaitan dengan sekitar 27 orang lebih sedikit yang menganggur, tetapi interval kepercayaannya mencakup penurunan dan peningkatan. Setelah efek tahun ditambahkan, koefisien mendekati nol, yaitu -0,007 ribu orang per tambahan seribu UMKM. Hasil beda pertama dan model logaritmik juga menghasilkan arah negatif, tetapi tidak presisi. Karena itu, Hipotesis 1 tidak memperoleh dukungan yang kuat.

Hasil tersebut tidak berarti UMKM tidak memiliki nilai sosial. Temuan hanya menunjukkan bahwa jumlah unit terdaftar merupakan ukuran yang lemah untuk penyerapan tenaga kerja. Banyak usaha mikro dijalankan oleh pemilik sendiri atau menggunakan tenaga keluarga yang tidak dibayar. Selain itu, penambahan usaha baru dapat berjalan bersamaan dengan penutupan usaha, pertumbuhan angkatan kerja, atau perpindahan penduduk. Pengalaman lintas wilayah juga menunjukkan bahwa dampak pekerjaan bergantung pada sektor, inovasi, keterampilan, dan kondisi spasial, bukan pada jumlah usaha semata (Doroshenko & Shorokhova, 2026; Phuong & Thuy Anh, 2026; Terentyeva, 2026).

Perbedaan daerah memperkuat penafsiran tersebut. Tarakan mengalami pertumbuhan UMKM terbesar, tetapi pengangguran meningkat pada akhir periode. Sebagai pusat perdagangan dan jasa, Tarakan dapat menarik pencari kerja dari wilayah lain sehingga pertumbuhan usaha terjadi bersamaan dengan pertumbuhan penawaran tenaga kerja. Sementara itu, Nunukan mencatat penurunan pengangguran yang lebih kuat, tetapi perbaikan tersebut tidak diikuti penurunan kemiskinan.

Hubungan UMKM dengan Kemiskinan

Untuk kemiskinan, koefisien pada model tingkat bernilai positif. Dalam model efek tetap dua arah, tambahan seribu UMKM berkaitan dengan sekitar 83 orang tambahan dalam kemiskinan. Namun, hubungan tersebut kehilangan ketepatan statistik ketika model menggunakan beda pertama atau transformasi logaritmik. Dengan demikian, hasil tidak membuktikan bahwa UMKM meningkatkan kemiskinan, tetapi juga tidak mendukung Hipotesis 2 bahwa kenaikan jumlah usaha secara otomatis menurunkan kemiskinan.

Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan
JUREKA : Jurnal Ekonomi Pembangunan
Website : https://jureka.fekonubt.net/index.php/jureka

Hubungan positif dapat mencerminkan kausalitas terbalik. Ketika pendapatan rumah tangga menurun dan pekerjaan bergaji sulit diperoleh, masyarakat dapat masuk ke usaha mikro sebagai strategi bertahan hidup. Usaha baru kemudian muncul bersama tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Pada usaha informal berproduktivitas rendah, pendapatan dapat tidak teratur, jam kerja terbatas, dan pasar lokal terbagi di antara lebih banyak penjual. Dalam kondisi tersebut, status bekerja tidak menjamin pendapatan yang cukup untuk melewati garis kemiskinan.

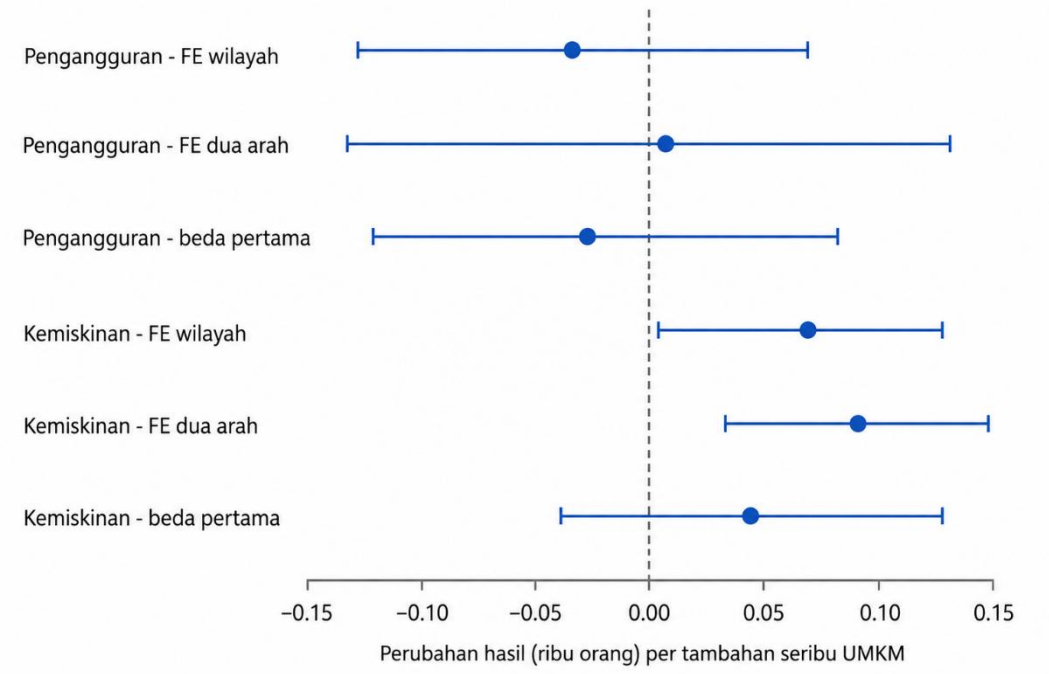
Kesejahteraan ditentukan oleh nilai tambah per pekerja dan distribusi nilai tersebut. Penjualan harus menutup input, transportasi, biaya kredit, depresiasi, dan tenaga keluarga sebelum menjadi pendapatan bersih. Dukungan digital dapat memperluas pasar, tetapi hanya efektif jika disertai pengetahuan, kepercayaan, logistik, dan kemampuan organisasi (Afrianty et al., 2026; Karanasios et al., 2026). Di wilayah terpencil, biaya angkut, ukuran pasar, dan akses energi juga membatasi kemampuan usaha mengubah penjualan menjadi pendapatan rumah tangga.

Oleh karena itu, koefisien positif dalam model tingkat sebaiknya dibaca sebagai peringatan terhadap substitusi indikator. Kenaikan jumlah UMKM tidak dapat digunakan sebagai bukti penurunan kemiskinan tanpa informasi langsung mengenai status aktif, kelangsungan hidup, pekerja berbayar, laba, dan pendapatan rumah tangga.

Tabel 2. Estimasi hubungan jumlah UMKM dengan pengangguran dan kemiskinan

Hasil dan model	Koef.	SE HC3	IK 95%	p	Adj. R^2
Pengangguran - FE wilayah	-0,027	0,047	[-0,124; 0,069]	0,563	0,900
Pengangguran - FE dua arah	-0,007	0,059	[-0,132; 0,117]	0,902	0,882
Pengangguran - beda pertama	-0,023	0,051	[-0,129; 0,084]	0,662	-0,097
Pengangguran - log FE dua arah	-0,113	0,133	[-0,392; 0,166]	0,406	0,939
Kemiskinan - FE wilayah	0,056	0,026	[0,002; 0,110]	0,043	0,993
Kemiskinan - FE dua arah	0,083	0,022	[0,038; 0,128]	0,001	0,995
Kemiskinan - beda pertama	0,034	0,030	[-0,030; 0,097]	0,284	0,408
Kemiskinan - log FE dua arah	0,068	0,046	[-0,029; 0,164]	0,158	0,997

Catatan: koefisien model tingkat dan beda pertama menunjukkan ribu orang per tambahan seribu UMKM; koefisien model log merupakan elastisitas. FE = efek tetap; IK = interval kepercayaan.



Gambar 2. Koefisien utama dan interval kepercayaan 95 persen.

Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan
JUREKA : Jurnal Ekonomi Pembangunan
Website : https://jureka.fekonubt.net/index.php/jureka

Implikasi Teoretis dan Kebijakan

Temuan mendukung model inklusi berbasis kondisi, bukan model otomatis. Registrasi membuka peluang partisipasi, tetapi manfaat kesejahteraan muncul ketika usaha aktif, bertahan, meningkatkan produktivitas, menjangkau permintaan yang berkembang, serta menciptakan pekerjaan berbayar. Perspektif ini memperluas logika keterkaitan Hirschman (1958): nilai pembangunan suatu usaha ditentukan oleh keterkaitan produksi dan distribusi yang diciptakan, bukan hanya keberadaan administratifnya.

Implikasi pertama adalah mengubah sasaran evaluasi dari jumlah unit menjadi panel kinerja yang mencakup status aktif, umur usaha, pekerja dibayar dan tidak dibayar, penjualan, produktivitas, kelangsungan hidup, serta partisipasi dalam rantai nilai. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan nilai bersama, yaitu menilai usaha berdasarkan nilai ekonomi dan sosial yang benar-benar dihasilkan (Khurshid & Snell, 2021).

Kedua, dukungan perlu disusun secara berurutan. Registrasi harus diikuti pembukuan, peningkatan produk, sertifikasi, kemampuan digital, modal kerja, dan pengembangan pasar. Pembiayaan yang diberikan tanpa permintaan dan praktik usaha yang memadai dapat menambah risiko (Ashraf & Lyons, 2026). Pemerintah daerah perlu menyeimbangkan dukungan pembiayaan dengan pengadaan lokal, pengembangan pemasok, agregasi distribusi, koneksi usaha besar, dan pemasaran digital.

Ketiga, kebijakan harus membedakan usaha berorientasi pertumbuhan dari usaha berbasis kebutuhan. Kelompok pertama memerlukan teknologi, investasi, sertifikasi, dan integrasi pemasok. Kelompok kedua memerlukan pembiayaan berisiko rendah, layanan dasar usaha, perlindungan sosial, dan jalur menuju pekerjaan yang lebih produktif. Bukti ekosistem Indonesia menunjukkan bahwa paket terpadu lebih relevan daripada intervensi tunggal (Safitri et al., 2026).

Keempat, desain program perlu disesuaikan dengan lokasi. Tarakan membutuhkan peningkatan produktivitas dan transisi dari usaha mikro menuju usaha yang mempekerjakan tenaga kerja formal. Wilayah perbatasan dan pedalaman membutuhkan logistik, energi, agregasi pasar, dan pembiayaan yang disesuaikan dengan biaya jarak. Pengembangan pariwisata atau ekonomi pesisir dapat menciptakan pendapatan, tetapi manfaatnya bergantung pada pemerataan akses infrastruktur dan pasar (Subarsono et al., 2026).

Terakhir, tata kelola data harus diperkuat. Register usaha perlu membedakan unit baru, aktif, tidak aktif, dan tutup serta menyediakan definisi, catatan revisi, dan identitas wilayah yang konsisten. Audit penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan nilai antartabel dan grafik dapat memengaruhi inferensi. Reproduksibilitas merupakan syarat evaluasi program yang kredibel.

Kesimpulan

Pertumbuhan jumlah UMKM terdaftar di Kalimantan Utara selama 2017-2022 tidak diikuti perbaikan yang sebanding pada pengangguran dan kemiskinan. Model efek tetap dua arah menghasilkan hubungan yang mendekati nol untuk pengangguran. Hubungan kemiskinan pada model tingkat bernilai positif, tetapi tidak bertahan secara meyakinkan dalam model beda pertama dan logaritmik. Dengan demikian, jumlah unit usaha saja belum cukup untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan inklusif.

Implikasi teoretis utama adalah perbedaan antara partisipasi kewirausahaan dan transformasi kewirausahaan. Partisipasi meningkat ketika lebih banyak unit masuk dalam register. Transformasi baru terjadi ketika usaha aktif, bertahan, meningkatkan produktivitas, menciptakan pekerjaan berbayar, dan menghasilkan pendapatan rumah tangga yang berkelanjutan. Kebijakan UMKM karena itu perlu mengukur seluruh rantai konversi, bukan hanya titik awalnya.

Penelitian dibatasi oleh panel yang pendek, penggunaan data jumlah, kemungkinan perubahan registrasi pada 2021, serta tidak tersedianya informasi tingkat usaha dan rumah tangga. Penelitian berikutnya perlu menggabungkan register usaha dengan data pekerja, penjualan, kelangsungan hidup, populasi, angkatan kerja, dan kesejahteraan rumah tangga. Pendekatan tersebut akan membantu menentukan kondisi ketika pertumbuhan UMKM benar-benar berubah menjadi inklusi ekonomi.

Daftar Pustaka

Abramowitz, J., & Joung, A. (2026). Self-employment of older workers and the transition to retirement: Using machine learning to uncover heterogeneity in work arrangements. Innovation in Aging, 10(7). https://doi.org/10.1093/geroni/igag043

Afrianty, T. W., Raharjo, K., Prakasa, Y., Abimanyu, A., & Burgess, J. (2026). Internal and external factors enhancing knowledge acquisition and digital literacy for digital business transformation: Evidence from small businesses in Indonesia. Social Sciences and Humanities Open, 13. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102851

Akmatov, S., Samiev, K., Ergeshov, A., Abdyrakhmanova, T., & Boronbaev, A. (2026). The role of small enterprises in

Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan
JUREKA : Jurnal Ekonomi Pembangunan
Website : https://jureka.fekonubt.net/index.php/jureka

promoting economic growth and social welfare. P.A. Persona e Amministrazione, 1(1), 207-228.

Anggraeni, L., Hodijah, S., & Umiyati, E. (2026). Unlocking inclusive growth: The mediating role of e-commerce in MSME digitalization for economic development and SDGs achievement in Jambi Province, Indonesia. Economies, 14(2). https://doi.org/10.3390/economies14020044

Ashraf, A., & Lyons, E. (2026). Complementing business training with access to finance: Evidence from SMEs in Kenya. Journal of Development Economics, 179. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2025.103645

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. (2022). Data jumlah pengangguran, kemiskinan, dan UMKM kabupaten/kota, 2017-2022. https://kaltara.bps.go.id/

Doroshenko, S. V., & Shorokhova, I. S. (2026). The employment structure of small and medium-sized enterprises: Northern location and other factors. Sever i Rynok: Formirovanie Ekonomiceskogo Poradka, 29(1), 16-31. https://doi.org/10.37614/2220-802X.1.2026.91.002

Eronmwon, I., Omorogbe, I., Edobor, E. W., & Obiosa, N. (2026). Do agrifood SMEs survive differently across value chain segments and regions? Evidence from a cross-regional survival analysis. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies. https://doi.org/10.1108/JADEE-12-2025-0592

Gupta, R., & Singh, B. P. (2026). Effect of access to finance and investment climate on the performance of small and medium enterprises in India. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 15(1). https://doi.org/10.1186/s13731-026-00642-9

Hirschman, A. O. (1958). The strategy of economic development. Yale University Press.

Karanasios, S., Senyo, P. K., Zorina, A., & Effah, J. (2026). Digital bricolage and its limits: How microenterprises undertake digitalization in resource-constrained environments. Information Systems Research, 37(1), 526-548. https://doi.org/10.1287/isre.2023.0193

Khurshid, H., & Snell, R. S. (2021). Examining mechanisms for creating shared value by Asian firms. Journal of Business Research, 129, 122-133. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.030

Leckė, G., & Legenzova, R. (2026). Exploring the gap in the dynamic financial resilience of urban and rural SMEs. Economies, 14(5). https://doi.org/10.3390/economies14050160

Mekonnen, D. A., & de Brauw, A. (2026). Assessing the role of food MSMEs in providing employment for women and youth in Ethiopia. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 15(1). https://doi.org/10.1186/s13731-026-00622-z

Mergenbayeva, A., Nurasheva, K., Abishova, A., & Urazbayeva, G. (2026). Research on the shadow economy and assessment of its scale: On the example of Kazakhstan. Economies, 14(4). https://doi.org/10.3390/economies14040135

Musa, H., & Chinniah, M. (2016). Malaysian SMEs development: Future and challenges on going green. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 224, 254-262. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.457

Phuong, C. T. M., & Thuy Anh, T. (2026). Challenging the displacement myth: Technology, innovation, and employment in Vietnam. Innovation and Development, 16(1), 197-215. https://doi.org/10.1080/2157930X.2025.2501457

Pramanik, M. A., Kayes, A. N. M., Fahim, A. U., & Tuba, K. M. H. (2026). SME development for poverty alleviation using GIS and AHP-based multi-criteria decision analysis. Sustainable Futures, 11. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101598

Safitri, K. A., Wijaya, C., & Huseini, M. (2026). Entrepreneurial ecosystem constraints for MSME resilience: Evidence from Indonesian multiple-case study. Sustainability, 18(12). https://doi.org/10.3390/su18125875

Subarsono, A., Rahmawati, I. Z., Laksana, L. U. A., Prabawati, V. D. N., Wessiani, N. A., & Sulistiono, B. (2026). Poverty alleviation for coastal communities through tourism development: A case study of Kulon Progo Regency. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 18(3), 767-786. https://doi.org/10.1080/19407963.2025.2465323

Tambunan, T. (2012). UMKM di Indonesia. Ghalia Indonesia.

Terentyeva, M. A. (2026). Labor markets and small business employment in northern regions: Regional and sectoral characteristics. Sever i Rynok: Formirovanie Ekonomiceskogo Poradka, 29(2), 97-111. https://doi.org/10.37614/2220-802X.2.2026.92.007

Wahyuningsih, S. (2009). Peranan UKM dalam perekonomian Indonesia. Mediagro, 5(1), 1-14.